

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Redistribusi hasil pembangunan ekonomi yang relatif merata antar lapisan masyarakat, sehingga *output* pembangunan ekonomi yang dicapai tidak hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan ekonomi yang berkualitas. Di dalam setiap proses pembangunan ekonomi di setiap daerah memiliki tujuan akhir yang sama yakni penciptaan tingkat kesejahteraan hidup (*standard of living*) yang tinggi dalam jangka panjang dengan indikator tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penduduk miskin yang rendah dan distribusi pendapatan tidak timpang. Salah satu parameter utama pembangunan yaitu berkurangnya penduduk miskin. Efisiensi dalam penurunan penduduk miskin menjadi progres utama dalam mengambil kebijakan atau instrument pembangunan. Sehingga salah satu tolak ukur utama dalam penetapan sektor unggulan pembangunan ekonomi ialah dengan efisiensi penduduk miskin yang terus menurun (Simatupang dan Sakyanu dalam Didu, 2016:103). Fakta menunjukkan, prestasi kemajuan pembangunan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi telah tercapai di Indonesia, namun masalah kemiskinan masih merupakan fenomena yang sulit terpecahkan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang yang sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari hari dikarenakan beberapa penyebab salah satunya pendapatan yang diperoleh seseorang tersebut masih rendah. (Anonim, 2021)

menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs). Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu (1) Headcount Index, (2) indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index). (3) indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index). Headcount Index digunakan untuk mengukur kebutuhan absolut yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non makanan (non food line). Garis kemiskinan sebagai dasar untuk perhitungan Headcount index ditentukan berdasarkan batas pengeluaran minimum untuk konsumsi makanan setara dengan 2100 kalori per hari dan konsumsi non makanan. Fenomena yang sama terjadi di Provinsi Jawa Tengah dimana angka penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi dengan posisi ke dua termiskin dari 33 Provinsi di Indonesia tahun 2006-2020.

N O	Provinsi	Kemiskinan														Total Rata-rata	
		Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) di Indonesia Tahun 2006-2020															
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jawa Timur	7.678.100	7.155.300	6.651.300	6.022.590	5.529.300	5.356.100	4.960.540	4.865.820	4.748.420	4.775.970	4.638.530	4.405.270	4.292.150	4.056.000	4.585.970	5.314,765
2	Jawa Tengah	7.100.600	6.557.200	6.189.600	5.725.690	5.369.160	5.107.360	4.863.410	4.704.870	4.561.820	4.505.780	4.493.750	4.197.490	3.867.420	3.679.400	4.119.930	5.002,899
3	Jawa Barat	5.712.500	5.457.900	5.322.400	4.983.570	4.773.720	4.648.630	4.421.480	4.382.650	4.238.960	4.485.650	4.168.110	3.774.410	3.539.400	3.375.890	4.188.520	4.498,253
4	Sumatera Utara	1.897.100	1.768.500	1.613.800	1.499.680	1.490.890	1.481.310	1.378.450	1.390.800	1.360.600	1.508.140	1.452.550	1.326.570	1.291.990	1.260.500	1.356.720	1.471,840
5	Lampung	1.638.000	1.661.700	1.591.600	1.558.280	1.479.930	1.298.710	1.218.990	1.134.280	1.143.930	1.100.680	1.139.780	1.083.740	1.091.600	1.041.480	1.091.140	1.284,923
6	Sumatera Selatan	1.446.900	1.331.800	1.249.600	1.167.870	1.125.730	1.074.810	1.042.040	1.108.210	1.085.800	1.112.500	1.096.500	1.086.760	1.076.400	1.067.160	1.119.650	1.146,117
7	Nusa Tenggara Timur	1.273.900	1.163.600	1.098.300	1.013.150	1.014.090	1.012.900	1.000.290	1.009.150	991,880	1.160.530	1.150.080	1.134.740	1.134.110	1.129.460	1.173.530	1.097,314
8	Aceh	1.149.700	1.083.700	959.700	892.860	861.850	894.810	876.560	855.720	837,420	859,410	841,310	829,800	831,500	809,760	833,910	894,534
9	Sulawesi Selatan	1.112.000	1.083.400	1.031.700	963.570	913.430	832.910	805.920	857,440	806,350	864,510	796,810	825,970	779,640	759,580	800,240	882,231
10	Papua	816.700	793.400	733.100	760.350	761.620	944.790	976.370	1.057.980	864,110	898,210	914,870	910,420	915,220	900,950	912,230	877,355

Tabel 1.1 Peringkat 1-10 Penduduk Miskin Tertinggi Di Indonesia Tahun 2006-2020 (Ribuan Jiwa). Sumber : BPS, Data Diolah (2021)

Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 32.800,69 km², dengan jumlah penduduk 36.516.035 jiwa pada tahun 2020 dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan menduduki posisi ke dua termiskin akibat jumlah populasi

penduduk dan dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran terbuka yang masih belum optimal penanganannya dalam menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam segi pembangunan.

Salah satu indikator dari kesejahteraan rakyat di suatu kabupaten atau kota adalah dengan melihat PDRB. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (BPS, 2021). PDRB menjadi salah satu parameter kemajuan penduduk pada suatu daerah, sehingga semakin bertambah PDRB perkapitanya maka semakin meningkat kemakmuran masyarakat pada wilayah tersebut.

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah 2006-2020 (Juta Rupiah)
2006	502.200.054
2007	530.287.830
2008	560.030.792
2009	588.823.044
2010	623.224.621
2011	656.268.130
2012	691.343.116
2013	726.655.118
2014	764.959.150
2015	806.765.092
2016	849.099.355
2017	893.750.296
2018	941.091.144
2019	991.913.119
2020	965.629.085

Tabel 1.2 PDRB Di Jawa Tengah Tahun 2006-2020 (Juta Rupiah). Sumber :
BPS, Data Diolah (2021)

Akan tetapi jika melihat dari pertumbuhan PDRB sebagai salah satu indikator kesejahteraan (BPS 2021). PDRB seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah

terus mengalami peningkatan dari tahun 2006 hingga tahun 2020 dimana pada tahun 2006 sebesar 502.200.054 dan di tahun 2020 sebesar 965.629.085 juta rupiah.

Kondisi ini juga terkonfirmasi melalui rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8. Artinya kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut masih dianggap rendah sejalan dengan penduduk miskin yang masih relatif tinggi. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten atau kota dengan penduduk miskin yang sangat bervariasi. Ditinjau dari kabupaten atau kota mengalami fluktuasi yang cenderung menurun di beberapa kabupaten kota tahun 2006-2020.

NO	Kabupaten / Kota	Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2020 (ribu jiwa)														Rata-Rata	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	Kabupaten Brebes	533.100	492.200	459.300	432.400	398.700	394.400	364.900	367.900	355.100	352.000	348.000	343.500	309.200	293.200	308.780	385.763
2	Kabupaten Banyumas	362.200	333.000	340.600	319.800	314.100	328.500	303.900	296.800	283.500	285.900	283.900	283.200	226.200	211.600	225.840	293.269
3	Kabupaten Kebumen	388.700	362.400	334.900	309.600	263.000	279.400	258.500	251.100	242.300	241.900	235.900	233.400	208.700	201.300	211.090	268.146
4	Kabupaten Cilacap	402.100	363.600	343.900	318.800	297.200	282.000	260.900	255.700	239.800	243.500	240.200	238.300	193.200	185.200	198.600	270.867
5	Kabupaten Pemalang	338.200	307.100	325.200	303.700	251.800	261.200	241.700	246.800	237.000	235.500	227.100	225.000	208.300	200.700	209.030	254.555
6	Kabupaten Grobogan	361.900	330.400	262.000	247.500	233.700	227.800	210.800	199.000	186.500	184.500	184.100	181.000	168.700	161.900	172.260	220.804
7	Kabupaten Klaten	257.400	249.100	243.100	220.200	197.400	203.100	187.900	179.500	168.200	172.300	168.000	165.000	151.700	144.100	151.830	190.589
8	Kabupaten Purbalangga	262.900	246.300	221.900	205.000	208.900	196.000	181.300	181.100	176.000	176.500	171.800	171.900	144.200	140.100	149.480	188.892
9	Kabupaten Demak	263.500	238.900	217.200	202.200	198.800	192.500	178.100	172.500	162.000	160.900	158.800	152.600	144.100	137.600	146.870	181.771
10	Kabupaten Magelang	199.100	200.100	190.800	176.500	167.200	179.600	166.200	171.000	160.500	162.400	158.900	157.200	143.400	137.400	146.340	167.776
	PROVINSI JAWA TENGAH	7.100.600	6.557.000	6.122.600	5.655.400	5.217.200	5.256.000	4.863.500	4.811.300	4.561.820	4.577.000	4.506.890	4.450.720	3.897.200	3.743.230	3.980.900	4.684.686

Tabel 1.3 Peringkat 1-10 Penduduk Miskin Tertinggi Di Jawa Tengah Tahun 2006-2020 (Ribu Jiwa). Sumber : BPS Jateng, Data Diolah (2021).

Jumlah penduduk miskin tertinggi di salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Brebes pada tahun 2006-2020. Selama kurun waktu 2006-2020 penduduk miskin di Kabupaten Brebes setiap tahunnya cenderung fluktuatif, dimana di tahun 2006 penduduk miskin sebesar 533.100, angka tersebut sempat menurun di tahun 2012 sebesar 364.900 dan naik kembali pada tahun 2013 sebesar 367.900. Di

tahun 2014 sampai tahun 2019 mengalami penurunan hingga tahun 2020 adanya peningkatan.

Pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah mayoritas mengindikasikan terdapat perkembangan penduduk miskin merendah pada tahun 2006-2020, namun masih ada daerah yang berfluktuasi dikarenakan belum menyeluruhnya upaya pemerintah memberantas masalah kemiskinan pada kabupaten atau kota menjadi pemicu tingginya penduduk miskin (Bappenas,2018). Kota Magelang merupakan kota dengan rata-rata penduduk miskin paling rendah di tahun 2006-2020 sebesar 158,29. Walaupun terjadi penurunan kemiskinan sejak tahun 2006- 2019 dan kembali naik di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19, kondisi kemiskinan tetap perlu diwaspadai karena sebagian besar penduduk berada di bawah garis kemiskinan dan sebagian berada di sekitar garis kemiskinan, kemungkinan terjadi goncangan sosial yang akan memperparah jumlah kemiskinan yang tersebar di Jawa Tengah. Kondisi kemiskinan bersifat multidimensi. Salah satu studi yang kaji oleh Titik (Suhartini, 2017) bahwa pembangunan sumberdaya manusia merupakan salah satu strategi dalam penurunan angka kemiskinan. Kualitas sumberdaya yang rendah akan menurunkan produktivitas sehingga upah juga akan rendah. Kemiskinan dipandang dari rendahnya derajat kesehatan menurut (Kartasasmita, 1996) dalam (Imam Sumardjoko, 2017) akan menentukan gizi seseorang dengan demikian jika miskin maka gizi juga rendah menyebabkan rendahnya ketahanan fisik, daya pikir dan prakarsa yang akan mempengaruhi produktivitas dan pendapatan. Pengangguran terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja

tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur. Jumlah Pengangguran Terbuka yang tinggi dapat membawa berbagai dampak pada proses pembangunan ekonomi. Agar tidak terus berlanjut, pemerintah harus mengatasi masalah pengangguran, karena masalah pengangguran adalah masalah yang sangat vital dan sensitif bagi kestabilan ekonomi dan keamanan suatu negara. Pengangguran dapat membawa dampak yang sangat berbahaya jika tidak segera diatasi. Pengangguran berdampak dalam bidang ekonomi, sosial, maupun secara individual pada pelaku pengangguran itu sendiri.

N O	Kabupaten /Kota	Jumlah Pengangguran Terbuka (Ribuan Jiwa) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2020														
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
1	Kabupaten Brebes	101.083	81.094	65.357	79.116	72.659	88.754	67.116	90.045	80.420	53.261	72.051	65.167	66.232	89.494	76.561
2	Kabupaten Cilacap	71.338	93.016	75.495	89.175	74.298	82.324	57.496	54.057	44.098	62.332	52.992	60.452	61.548	80.811	68.531
3	Kota Semarang	68.810	85.249	85.710	83.963	71.499	64.720	50.831	51.423	68.978	51.229	63.700	48.558	43.317	98.001	66.856
4	Kabupaten Tegal	60.806	69.196	64.281	60.152	47.313	68.973	39.687	43.794	55.259	59.905	51.000	57.290	57.774	70.246	57.548
5	Kabupaten Pemalang	74.502	55.792	60.483	79.372	66.630	42.754	30.246	39.725	47.759	38.678	34.773	38.763	41.381	48.784	49.975
6	Kabupaten Banyumas	57.800	58.273	57.620	59.582	58.403	50.000	39.372	41.699	41.873	47.172	38.048	36.153	36.576	52.689	48.233
7	Kabupaten Pati	52.744	55.607	59.012	49.094	38.604	71.098	78.174	48.102	41.390	28.613	24.826	23.447	23.861	30.244	44.630
8	Kabupaten Demak	34.954	40.154	35.569	30.022	29.696	26.719	46.523	38.654	28.552	34.204	25.704	43.198	32.218	45.290	35.104
9	Kabupaten Grobogan	37.267	45.080	43.657	46.610	33.179	39.298	31.156	44.489	31.911	37.736	22.590	16.534	25.964	33.496	34.926
10	Kabupaten Kebumen	53.030	45.193	35.304	49.241	46.876	28.913	22.942	21.633	20.985	25.521	33.110	32.422	29.167	38.484	34.487
	Jawa Tengah	1.197.244	1.360.219	1.227.308	1.046.883	1.252.267	1.203.342	982.093	1.054.062	996.344	863.783	823.938	815.083	818.276	1.214.342	1.061.085

Tabel 1.4 Jumlah Pengangguran Terbuka di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2020 (Ribuan Jiwa). Sumber : BPS Jateng, Data Diolah (2021).

Jumlah Pengangguran Terbuka tertinggi di Provinsi Jawa Tengah diduduki oleh Kabupaten Brebes sejak tahun 2011 hingga 2020 mengalami fluktuatif. Beberapa di daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah mengalami peningkatan Jumlah Pengangguran Terbuka dikarenakan berbagai hal salah satunya dengan banyaknya

industri yang menggunakan alat yang cukup canggih tanpa bantuan manusia yang memaksa produsen untuk mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Pada umumnya, makin maju tingkat indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto dan semakin kecil Jumlah Pengangguran Terbuka di suatu negara atau daerah, maka semakin kecil pula penduduk miskin.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Jumlah Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin Di Jawa Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah seperti berikut :

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Penduduk Miskin di Jawa Tengah?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Penduduk Miskin di Jawa Tengah?
3. Apakah Jumlah Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Penduduk Miskin di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, tujuan yang diharapkan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penduduk Miskin di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penduduk Miskin di Jawa Tengah

3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pengangguran Terbuka terhadap Penduduk Miskin di Jawa Tengah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah dalam studi ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Daerah yang menjadi objek penelitian adalah 35 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu yang digunakan yaitu tahun 2011 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, Jumlah Pengangguran Terbuka sebagai variabel bebas.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, Jumlah Pengangguran Terbuka terhadap Penduduk miskin di Jawa Tengah dengan menggunakan metode analisis data panel. Data yang di gunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah periode 2006-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemangku kebijakan, dapat menjadikan penelitian ini sebagai pertimbangan dalam memberikan kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah
2. Bagi kalangan akademis, diharapkan akan menambah wawasan dan sebagai referensi dalam penelitian yang sejenis di masa yang akan datang
3. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai komponen yang mempengaruhi penduduk miskin Jawa Tengah